

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Masalah pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Hal ini secara jelas tersirat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 sebagai dasar-dasar perekonomian nasional.<sup>1</sup> Untuk itu, negara dengan segala upaya aktif untuk menyelenggarakan serta menanggulangi setiap masalah yang menghambat pembangunan. Keterlibatan negara sebagai salah satu pihak dalam sebuah sistem pemerintahan merupakan faktor penentu terhadap proses pembangunan. Ini berkaitan dengan persoalan kewenangan yang lebih luas yang dimiliki oleh negara sehingga dapat memberikan keputusan dalam menentukan desain perekonomian yang akan ditempuh. Sehingga negara harus pandai menganalisa kebijaksanaan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan kesejahteraan.

Kebijaksanaan negara terhadap perekonomian tidak hanya terbatas pada upaya pembangunan tetapi juga terhadap dampak dari dinamika perekonomian seperti kegagalan pasar. Mahzab Keynesian atau neo-keynesian berpendapat bahwa campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan perekonomian. Campur tangan pemerintah tersebut ditujukan untuk memperbaiki kegagalan-kegagalan pasar. Pengalaman Joseph Stiglitz ketika menjadi ketua dewan penasehat ekonomi AS di masa presiden Clinton, dapat menjadi rujukan.

---

<sup>1</sup> Tavip Muhammad, "Dinamika Negara Kesejahteraan Indonesia dalam UUD 1945" (Skripsi, Pasca Sarjana Hukum Universitas Brawijaya, 2013)

Clinton mewarisi perekonomian yang lesu dan tingkat pengangguran yang tinggi dari Ronald Reagan akibat kebijakan neoliberalisnya selama dua caturwarsa. Ketika Stiglitz dipanggil oleh Clinton menjadi penasihat ekonominya, bandul kebijakan ekonomi AS pun berubah. Peran pemerintah yang selama kepemimpinan Reagan di pangkas luar biasa, kembali ditingkatkan. Menurut Stiglitz, adagium “*the best government governs less*” (pemerintah yang terbaik memerintah sedikit) tidak tepat. Ia berpendapat, pemerintah yang baik tak harus besar atau kecil, melainkan efektif. Terhadap tuduhan kaum neoliberal yang berkata swasta lebih penting daripada pemerintah, Stiglitz menjawab bahwa bagaimanapun, pemerintah memiliki legitimasi publik dan kekuasaan sah yang tidak dimiliki swasta.<sup>2</sup>

Menurut Stiglitz, peran pemerintah haruslah aktif untuk mengoreksi kegagalan pasar, terutama dalam mengatasi globalisasi neoliberal saat ini, Stiglitz merekomendasikan agar negara, khususnya negara-negara berkembang, berperan aktif agar manfaat ekonomi tidak melulu kembali ke negara-negara maju dan untuk melindungi orang-orang yang kalah dan tersingkirkan di arena global. Pemerintah tidak boleh hanya manut pada pasar. Berkat resep-resepnya, AS pada masa Clinton dapat bangkit. Ekonomi kembali tumbuh. Pengangguran dan kesenjangan ekonomi diperkecil. Selama sepuluh tahun AS menikmati masa-masa keemasan ekonomi yang gemilang. Berkat kesuksesan itu Clinton dapat lepas dari pemakzulan (*impeachment*) yang digelontorkan lawan politiknya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Martin Manurung, “*Bedanya Stiglitz Dan Boediono*” <http://indoprogres.com/2007/08/23/bedanya-stiglitz-dan-boediono/> Diakses 10 Mei 2017

<sup>3</sup> Ibid

Salah satu persoalan yang disebabkan karena kegagalan ekonomi dan politik adalah inflasi. Inflasi sebenarnya mengandung dampak negatif dan positif, namun sering menimbulkan dampak negatif. Secara umum dampak inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi, dan produk nasional. Dampak positif dapat meningkatkan gairah produksi dan kesempatan kerja baru. Adapun dampak negatif dari inflasi yang dimaksud secara umum adalah :<sup>4</sup>

1. Inflasi menurunkan daya beli, terutama terhadap masyarakat miskin atau masyarakat yang berpendapatan tetap atau rendah.
2. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, termasuk masyarakat menjadi tidak suka menabung, sehingga investasi tetap rendah dan pada gilirannya menghambat pertumbuhan perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Semakin melebarkan kesenjangan pendapatan antara si miskin dan kaya.
4. Inflasi yang tinggi menghambat investasi produktif karena tingginya ketidakpastian.
5. Bagi pemerintah, inflasi sering menyulitkan karena kebijakan pemerintah menjadi tidak efektif dan dapat menimbulkan biaya sosial inflasi yang makin besar

Banyak pemicu inflasi, tetapi di Indonesia sebagai latar belakangnya dapat ditelusuri dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998. Krisis moneter yang melanda Indonesia diawali dengan terdepresiasi secara tajam nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (terutama dollar Amerika), akibat adanya efek

---

<sup>4</sup> Eko Prasetyo, “*Fundamental Makro Ekonomi*” (Beta Offset, Yogyakarta, 2012) Hal. 221

*domino* dari terdepresiasinya mata uang Thailand (Bath), salah satunya telah mengakibatkan terjadinya lonjakan harga barang-barang yang diimpor Indonesia dari luar negeri waktu itu. Lonjakan harga barang-barang impor tersebut, menyebabkan harga hampir semua barang yang dijual di dalam negeri meningkat baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama pada barang yang memiliki kandungan barang impor yang tinggi.<sup>5</sup>

Karena gagal mengatasi krisis moneter dalam jangka waktu yang pendek, bahkan cenderung berlarut-larut, menyebabkan kenaikan tingkat harga terjadi secara umum dan semakin berlarut-larut pula. Keadaan itu mengakibatkan angka inflasi nasional melonjak cukup tajam. Lonjakan tajam angka inflasi nasional yang tanpa diimbangi oleh peningkatan pendapatan nominal masyarakat, telah menyebabkan pendapatan riil masyarakat semakin merosot. Juga, pendapatan perkapita penduduk merosot relatif sangat cepat yang mengakibatkan Indonesia kembali masuk dalam golongan negara miskin. Hal ini telah menyebabkan semakin beratnya beban hidup masyarakat, khususnya pada masyarakat strata ekonomi bawah. Akhirnya krisis moneter pada tahun 1998 berujung pada krisis politik di Indonesia yang bermuara pada tumbangnya rezim Soeharto pada tahun 1998.<sup>6</sup>

Mengingat begitu kuatnya pengaruh angka inflasi di Indonesia, terdapat sebuah kesadaran bahwa ketidakstabilan ekonomi seperti fluktuasi inflasi juga akan menyebabkan ketidakstabilan politik. Dengan kata lain bahwa setiap masalah

---

<sup>5</sup> Buletin Jendela Pembangunan Daerah, "Upaya Mengendalikan Inflasi di Indonesia", (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, edisi Mei 2015), hal 8.

<sup>6</sup> Ahmad Azizuddin, "Analisis Konsep Ekonomi Politik Indonesia Terhadap Relevansi Negara", <http://saintific.wordpress.com/2013/06/07/sistem-ekonomi-politik-indonesia/> diakses 20 Mei 2017

ekonomi juga akan menyebabkan masalah-masalah politik, begitu pula sebaliknya ketidakstabilan politik dapat memicu masalah ekonomi. Konsekuensi dari hal ini yaitu tidak kondusifnya program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Maka dari itu upaya penanganan terhadap masalah inflasi ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Karena penyelesaian persoalan inflasi di Indonesia mempunyai artian yang berbanding lurus dengan penyelesaian masalah kemiskinan yang menjadi masalah besar dan berkepanjangan bagi bangsa ini.

Memasuki masa reformasi pemerintah mulai berbenah dengan melakukan perbaikan terhadap struktur dan sistem ekonomi-politik di Indonesia. Di kebijakan moneter, melalui UU No.23 tahun 1999 maka sejak tahun 2000 pemerintah mulai menerapkan kebijakan yang hanya mempunyai sasaran tunggal dalam jangka panjang yaitu inflasi yang biasa disebut *Inflation Targeting Framework* (ITF).<sup>7</sup> Undang-Undang tersebut juga memberikan independensi kepada Bank Indonesia untuk menerapkan kebijakannya secara otonom. Namun dengan amandemen DPR melalui Undang-Undang No. 3 tahun 2004 pemerintah mulai mengurangi goal independensi Bank Indonesia yang sebelumnya menentukan target inflasi sendiri menjadi hanya bebas dalam menerapkan instrumen-instrumen atau kebijakan-kebijakan yang dijalankannya untuk mencapai target yang ditetapkan, sedangkan target yang ingin dicapai ditetapkan bersama-sama dengan pemerintah.

Independensi Bank Indonesia bukan tanpa konsekuensi, adanya independensi ini kemudian seakan memutus hubungan antara otoritas moneter dan fiskal dalam artian

---

<sup>7</sup> Dani Setiawan dan Moh dan Ilyas Zainunnury, "Sketsa Ekonomi Indonesia", (Univesitas Jember, 2015) hal 30.

ini pemerintah dan BI. Bank Indonesia dan pemerintah menjadi sangat sulit sekali berkoordinasi dalam upaya pengendalian inflasi nasional. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat sedikit sekali yang berbasis inflasi, demikian sebaliknya kebijakan Bank Indonesia seakan tidak mau mempertimbangkan target-target pemerintah. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tidak adanya koordinasi fiskal-moneter merupakan faktor yang menyebabkan angka inflasi di Indonesia menjadi tinggi. Menurut *Dono Iskandar Djojosebroto*, Depkeu sebagai pengelola fiskal dan BI sebagai pengelola moneter selama ini justru hanya memanfaatkan informasi dan data yang diterbitkan oleh masing-masing pihak lainnya dalam penentuan target-target.<sup>8</sup>

**Tabel 1.1:**  
**Angka Inflasi Nasional**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Inflasi (perubahan % tahunan)	9.8	4.8	5.1	5.4	4.3	8.4	8.4	3.4	3.0
Target Bank Indonesia (perubahan % tahunan)	5.0	4.5	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	4.0	4.0

Sumber: Bank Indonesia

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat inflasi di Indonesia cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Sampai tahun 2014 inflasi masih berada di atas target inflasi Bank Indonesia dan angka inflasi 2008 adalah yang tertinggi dalam dasawarsa terakhir ini yaitu 9,8 persen. Baru pada tahun 2015 inflasi mulai menunjukkan perbaikan yaitu 3,4 persen. Hal ini bukan tanpa alasan, pada dasarnya

<sup>8</sup> Anggito Abimanyu dan Andie Megantara, *“Era Baru Kebijakan fiskal: Pemikiran Konsep dan Impelentasi”*, (Penerbit Buku Kompas, Jakarta, April 2009) Hal. 67

inflasi di Indonesia merupakan jenis inflasi non inti yang penanggulangannya mengandalkan usaha-usaha pemerintah sebagai otoritas kebijakan fiskal (*fiscal policy*).

Menurut Treinsman, inflasi sangat dipengaruhi oleh komitmen, koordinasi, dan formulasi kebijakan.<sup>9</sup> Intervensi pemerintah dalam menekan angka inflasi yaitu dengan menggunakan kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan sektor riil. Inflasi akan berhasil di tekan jika kebijakan-kebijakan tersebut mampu berkoordinasi dan menghasilkan bauran kebijakan (*mix policy*). Namun, kebijakan-kebijakan tersebut sangat sulit berkoordinasi disebabkan karena pihak otoritas berbeda di masing-masing kebijakan. Di bidang moneter Bank Indonesia memiliki independensi sendiri untuk menentukan kebijakannya. Sedangkan kebijakan fiskal dan sektor riil sangat bergantung pada komitmen politik pemerintah sebagai otoritas anggaran. Politik pembangunan dan politik anggaran pemerintah memainkan peran vital terhadap proses pembentukan inflasi.

Pengendalian inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi yang kuat antara pemerintah selaku otoritas fiskal dan pengambil kebijakan sektoral, serta Bank Indonesia (BI) sebagai penentu kebijakan moneter.<sup>10</sup> Berbagai permasalahan struktural yang masih terjadi seperti konektivitas yang rendah, struktur pasar yang terdistorsi, kesenjangan informasi harga dan produksi pangan menyebabkan pergerakan inflasi yang sering mengalami naik turun yang kurang terkendali. Efisiensi perekonomian daerah yang berbeda antara kawasan barat dan kawasan timur

---

<sup>9</sup> Daniel Treisman, “*desentralization and inflation in Developed and developing countries*”, (department of political science University of California, Los Angeles, 1998) Hal. 5

<sup>10</sup> Buletin Jendela Pembangunan Daerah, *Op.cit*, hal 12

juga menyebabkan terjadinya perbedaan harga yang cukup besar. Dalam rentang 10 tahun terakhir dapat terlihat bahwa pergerakan inflasi yang signifikan lebih disebabkan oleh faktor adanya penyesuaian kebijakan pemerintah terkait harga (*administered prices*) dan lonjakan harga komoditas pangan (*volatile foods*).

Penyebab inflasi yang berasal dari komoditas pangan (*volatile food*) dan *admistered price* berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang publik (*public goods*). Berg menjelaskan bahwa barang publik (*public goods*) sangat terkait dengan konsep ekonomi lain seperti eksternalitas, yang mengarah pada biaya dan manfaat yang tercipta di pasar yang bersifat tambahan dan eksternal terhadap produk yang diproduksi dan dibeli dipasaran. Sedangkan Varian menyebutkan, barang publik merupakan konsep barang yang tidak menyebabkan persaingan dan pertentangan untuk mendapatkannya.<sup>11</sup> Barang tentunya akan menyebabkan persaingan jika ketersediaan tersebut terbatas sehingga setiap orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Persaingan di dalam kelangkaan ini kemudian yang memicu nilai barang menjadi tinggi menyesuaikan dengan permintaan yang ada.

Indonesia memiliki pendapatan melalui mekanisme pajak dan retribusi sebagai pendapatan utama yang salah satu gunanya adalah membiayai penyediaan barang publik (*publik goods*). Namun tidak sedikit penyediaan barang yang seharusnya menjadi *public goods* diserahkan pada mekanisme pasar dalam artian swasta. Menurut UNICEF, kekurangan penyediaan barang publik akan

---

<sup>11</sup> Lesmana Rian Andhika, “*Meta Theory : Kebijakan Barang Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat*”, (Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 8 No.1, Bandung, Ilmu Administrasi FISIP Universitas Padjadjaran, 2017) Hal. 42

mempengaruhi prospek pembangunan ekonomi, mengancam stabilitas ekonomi, perdamaian dan kemakmuran, selain itu barang publik juga bisa menjadi strategi untuk mengentaskan kemiskinan suatu negara.<sup>12</sup> Artinya bahwa jika pemerintah tidak menggunakan anggaran untuk menyediakan barang publik maka penyediaan tersebut akan diambil alih oleh swasta, tentunya dengan biaya yang lebih tinggi.

Proses pengendalian inflasi sangat mengandalkan alokasi dan distribusi anggaran pemerintah dalam menyediakan *public goods*. Anggaran penyediaan stok pangan, kelancaran distribusi, dan pemerataan informasi merupakan barang publik (*publik goods*) penyebab inflasi. Untuk itu, jika hal ini dikelola pemerintah dengan baik dalam penyediaannya maka dapat menekan angka inflasi di Indonesia. Pengendalian inflasi seharusnya tidak lagi dilihat dari kacamata moneter saja tetapi harus menganalisis berbagai sumber-sumber penyebab inflasi untuk menentukan instrumen kebijakan pengendalian yang tepat. Jika pengendalian inflasi memang membutuhkan instrumen fiskal maka yang harus dipikirkan adalah bagaimana pemerintah menyediakan barang publik (*publik goods*).

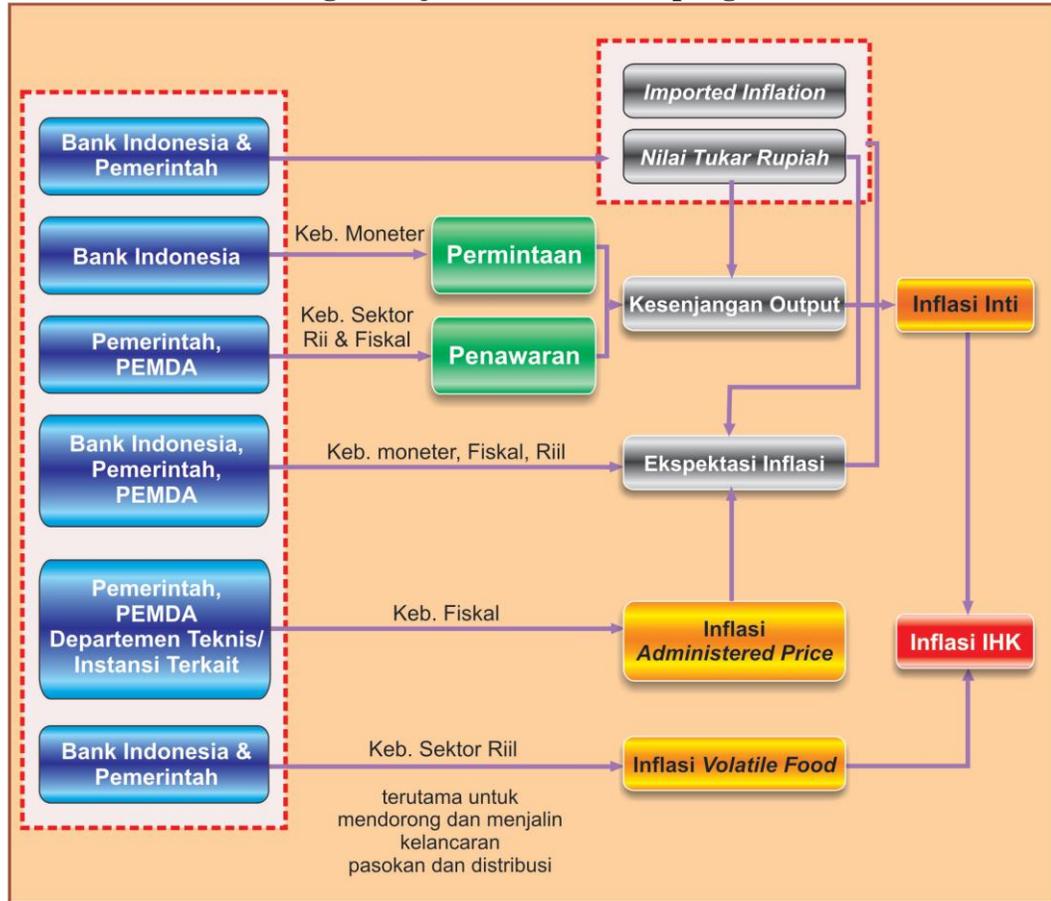
Karakteristik inflasi yang banyak dipengaruhi oleh faktor kejutan di sisi pasokan (*supply side*) tersebut menyebabkan upaya untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil tidak cukup hanya melalui kebijakan moneter, melainkan diperlukan adanya suatu paduan kebijakan yang harmonis antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan sektoral dan daerah. Bank Indonesia hanya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan,

---

<sup>12</sup> Ibid

sedangkan tekanan inflasi dari sisi penawaran berada di luar pengendalian Bank Indonesia.

**Gambar 1.1 :  
Sinergi Kebijakan Untuk Mempengaruhi Inflasi<sup>13</sup>**



Kebijakan moneter Bank Indonesia akan mempengaruhi tingkat inflasi dari sisi permintaan. Kebijakan moneter tidak dapat mempengaruhi inflasi dari sisi penawaran. Dengan kata lain, kemampuan kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi nasional terbatas. Pengendalian inflasi dari sisi penawaran tidak dapat dilakukan dengan kebijakan moneter, melainkan diperlukan kebijakan lain seperti kebijakan fiskal dan kebijakan sektoral oleh pemerintah. Kebijakan dari sisi

<sup>13</sup> Buku Petunjuk TPID, *Op.Cit*, hal 12.

penawaran ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi ekspektasi masyarakat dalam pembentukan tingkat harga. Oleh karena itu, pengendalian inflasi secara nasional memerlukan koordinasi dan atau kebijakan campuran (*policy mix*) karena faktor-faktor utama yang mempengaruhi inflasi seringkali merupakan gabungan/campuran baik dari sisi permintaan maupun penawaran serta ekspektasi pelaku usaha dan masyarakat luas.<sup>14</sup>

Menurut G.R. Terry koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan prinsip-prinsip syarat koordinasi yang efektif menurut N. V. R. Naidu dan T. Krishna Rao di antaranya adalah tahap awal, kontak langsung, kontinuitas, dinamisme, organisasi yang di sederhanakan, koordinasi diri, memutuskan tujuan yang jelas, defenisi otoritas dan tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang efektif dan pengawasan yang efektif.

Sementara itu, dengan berlakunya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak tahun 2004, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam menentukan target kebijakan fiskal daerahnya. Hal ini dapat mempersulit pengendalian inflasi karena selain instrument fiskal yang menyebar dan pihak yang terlibat semakin banyak, kebijakan fiskal daerah yang berorientasi pada inflasi pun masih sangat sedikit. Menurut Treisman, desentralisasi di negara-negara berkembang malah meningkatkan tekanan untuk memperbesar pengeluaran

---

<sup>14</sup> Suseno dan Siti astiyah, "*inflasi*"(Jakarta,Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, 2009) Hal. 52

pemerintah dan mendorong pinjaman pemerintah yang berlebihan sehingga menyulitkan kebijakan stabilisasi harga.<sup>15</sup>

Dalam tataran teknis, koordinasi antara Pemerintah dan BI telah diwujudkan dengan membentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat pada tahun 2005. Namun, pengendalian inflasi secara nasional juga penting untuk mendapat dukungan dari daerah. Pengendalian inflasi daerah mempunyai peran yang penting dalam mencapai inflasi yang rendah dan stabil mengingat inflasi nasional dibentuk oleh hampir 81% inflasi daerah, dan merupakan hasil agregasi dari inflasi sejumlah 82 kota di Indonesia.<sup>16</sup> Dengan demikian koordinasi yang dikembangkan melalui harmonisasi kebijakan dari/ke level daerah diharapkan dapat lebih efektif bukan hanya dalam menekan laju inflasi di daerah, tetapi juga akan berlanjut pada pencapaian sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil sebagaimana yang ingin dicapai bersama oleh Pemerintah dan Bank Indonesia.

Sejalan dengan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 maka pada tahun 2011 dilakukan kesepakatan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Bank Indonesia, dimana salah satu tindak lanjutnya adalah membentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID. Hal ini kemudian diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri dengan mengeluarkan Instruksi

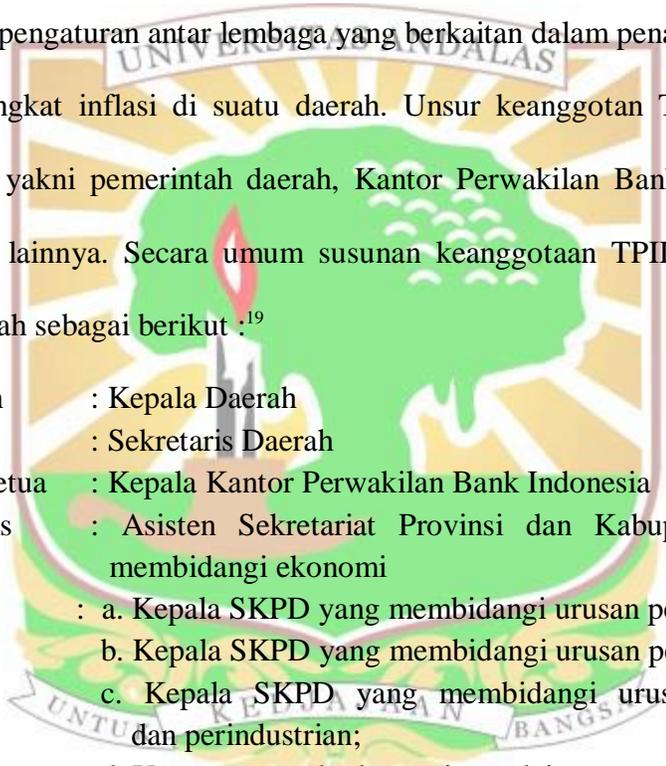
---

<sup>15</sup> Sri Adiningsih, "Koordinasi Dan Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter : Tantangan Kedepan", (Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2012) Hal.57

<sup>16</sup> Buku Petunjuk TPID, "Peran Strategis Pengendalian Inflasi Daerah", (Jakarta: Pokjanas TPID, Maret 2014), hal 15.

Mendagri tahun 2013 tentang “Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah” yang meminta seluruh kepala daerah untuk membentuk TPID.<sup>17</sup>

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah menjadi pedoman bagi daerah dalam pelaksanaan koordinasi TPID dalam menjaga stabilitas harga, serta untuk penyeragaman struktur organisasi/kelembagaan TPID.<sup>18</sup> TPID itu sendiri ditujukan sebagai wahana pengaturan antar lembaga yang berkaitan dalam penanggulangan atau pengendalian tingkat inflasi di suatu daerah. Unsur keanggotaan TPID terdiri dari berbagai unsur, yakni pemerintah daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya. Secara umum susunan keanggotaan TPID mengacu pada Inmendagri adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

- 
- Pengarah : Kepala Daerah
  - Ketua : Sekretaris Daerah
  - Wakil Ketua : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia
  - Sekretaris : Asisten Sekretariat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi ekonomi
  - Anggota :
    - a. Kepala SKPD yang membidangi urusan pertanian;
    - b. Kepala SKPD yang membidangi urusan perhubungan;
    - c. Kepala SKPD yang membidangi urusan perdagangan dan perindustrian;
    - d. Unsur pemangku kepentingan lainnya.

Dalam penyusunan Tim, SKPD yang menjadi anggota TPID disesuaikan dengan karakteristik perekonomian setempat. Apabila dalam perekonomian di daerah setempat sektor pertanian sangat dominan, maka unsur Dinas Pertanian sangat

---

<sup>17</sup> Buletin Jendela Pembangunan Daerah, *Op.cit*, hal 11.

<sup>18</sup> Kelompok kerja nasional TPID, 2014. *Buku petunjuk TPID* : hlm 16

<sup>19</sup> Ibid, hlm

diharapkan masuk sebagai anggota TPID. Demikian juga apabila perekonomian setempat didominasi oleh sektor manufaktur, maka unsur Dinas Perindustrian diharapkan dapat berperan aktif sebagai anggota TPID setempat. Sementara itu, untuk daerah yang ekonominya ditunjang oleh industri pariwisata, maka unsur Dinas Pariwisata diharapkan menjadi anggota TPID.

Tugas dan kewajiban TPID sebagaimana tercantum dalam lampiran

Inmendagri adalah sebagai berikut:

1. Memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
2. Memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
4. Melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
5. Melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
6. Melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan Inflasi di daerahnya;
7. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
8. Menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah;
9. Melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (moral suasion) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
10. Mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
11. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum Rapat Koordinasi Wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional TPID;

12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas TPID setiap 6 bulan sekali yang memuat:
  - a. Perkembangan dan prospek Inflasi Daerah
  - b. Identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil
  - c. Rumusan rekomendasi kebijakan
  - d. Pelaksanaan kebijakan
  - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
  - f. Rencana program kerja tahun berikutnya.
13. TPID Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TPID kepada Gubernur setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu pertama bulan Januari.

Tujuan umum pembentukan atau penguatan Tim pengendalian inflasi daerah adalah untuk menurunkan inflasi di daerah sehingga inflasi nasional juga turun pada tingkat yang rendah dan stabil. Tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Menurunkan laju inflasi daerah sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan inflasi nasional yang rendah dan stabil;
2. Meningkatkan kerja sama dan komitmen kelembagaan di daerah dalam pengendalian inflasi di daerah; dan
3. Memantau dan mengendalikan inflasi di daerah dengan rekomendasi langkah-langkah yang dapat diimplementasikan dan dimonitor.

Pasca keluarnya Instruksi Mendagri yang meminta seluruh daerah untuk membentuk TPID, maka sampai tahun 2016 terdapat sebanyak 432 TPID telah terbentuk di berbagai daerah.<sup>20</sup> Keberadaan TPID dengan beberapa upaya konkret yang telah dilakukan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah seperti pemberian subsidi ongkos angkut pasokan pangan di Jawa Timur, penambahan kapasitas bongkar muat di pelabuhan di Kupang, pemberlakuan sistem resi gudang di Cirebon,

---

<sup>20</sup> Buletin Jendela Pembangunan Daerah, *Op.cit*, hal 15

konvensi bahan bakar gas, dan pengarahannya ekspektasi masyarakat di Sumatera, terbukti mampu mengendalikan inflasi di Indonesia.<sup>21</sup>

Pada Rakornas TPID VII tahun 2016 dari berbagai daerah di Indonesia sebanyak 12 daerah yang mendapatkan penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik dan TPID berprestasi diantaranya adalah TPID kota Padang. Fenomena ini akhirnya membawa pemerintahan Kota Padang untuk menerima penghargaan yang diberikan langsung oleh presiden Joko Widodo sebagai Tim Pengendali Inflasi terbaik se-Sumatera. Keberhasilan ini dapat dikatakan sebagai hasil dari penataan organisasi dalam hal koordinasi. Seperti yang kemukakan oleh Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa “kuncinya adalah koordinasi setiap lembaga dalam memastikan ketersediaan pasokan, sehingga meminimalisir gejolak harga.”<sup>22</sup>

Dari pernyataan diatas dapat menjelaskan bahwa koordinasi atau pengkoordinasian mempunyai andil besar dalam menekan angka inflasi di kota Padang. Pemerintah kota padang dapat dikatakan berhasil dalam melakukan fungsi koordinasi dengan baik. Keberhasilan koordinasi berarti bahwa pemerintah berhasil melakukan integrasi dan sinkronisasi dari semua elemen unit organisasi dalam pelaksanaan tugas pengendalian inflasi.

## 1.2 Rumusan Masalah

---

<sup>21</sup> Sakinah Rakhma Diah Setiawan, “Bank Indonesia: TPID Terbukti Mampu Bantu Redam Inflasi” (Harian Kompas, edisi 21 Mei 2014), <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/21/1138319/Bank.Indonesia.TPID.Terbukti.Mampu.Bantu.Redam.Inflasi> diakses 25 Mei 2017

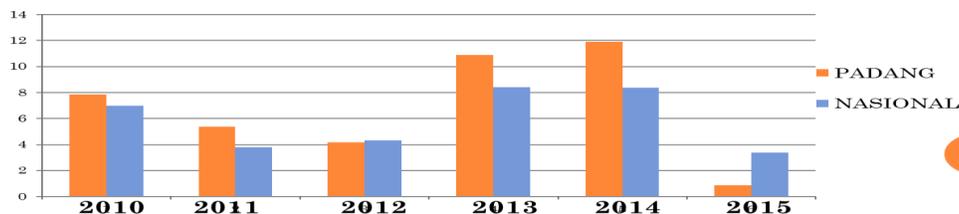
<sup>22</sup>Diakses <http://sumatra.bisnis.com/m/read/20160808/4/64461/strategi-pemkot-padang-kendalikan-inflasi> tanggal 9 oktober 2016 pukul 16.00 Wib.

Pengendalian inflasi di Kota Padang pada tahun 2015 sangatlah penting untuk dilakukan, hal ini mengingat bahwa Kota Padang merupakan daerah penyumbang inflasi nasional terbesar kelima di Indonesia pada tahun 2014.<sup>23</sup> Di tingkat kota/kabupaten, Kota Padang merupakan penyumbang inflasi terbesar di Sumatera Barat. Jika ini tidak segera di selesaikan maka dapat berimbas pada konstelasi politik di kota Padang bahkan Sumatera Barat. Inflasi bukan hanya persoalan ekonomi semata, aktor *incumbent* bisa jatuh dari kursi kekuasaan hanya dengan mengutak-atik masalah inflasi. Sebab inflasi berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat.



**Tabel 1.2:**  
**Perkembangan angka Inflasi Kota Padang**  
**Dalam Enam Tahun Terakhir**

INFLASI / TAHUN	% YOY	
	PADANG	NASIONAL
2010	7.84	6.96
2011	5.37	3.79
2012	4.16	4.3
2013	10.87	8.38
2014	11.90	8.36
2015	0.85	3.35



<sup>23</sup> Indra Akuntoto, "Jokowi Beberkan Daerah dengan Inflasi Tertinggi dan Terendah", (Harian Kompas edisi 27 Mei 2015),

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/05/27/123844126/Jokowi.Beberkan.Daerah.dengan.Inflasi.Tertinggi.dan.Terendah> diakses 2 Juni 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama lima tahun berturut-turut sejak 2010 sampai 2014 angka inflasi Kota Padang selalu berada diatas angka inflasi nasional. Pada tahun 2014 tingkat inflasi Kota Padang bahkan mencapai 11,90 persen. Angka ini juga melebihi tingkat inflasi provinsi dan inflasi nasional. Pusat kegiatan perekonomian memang terjadi di kota-kota besar, akibatnya setiap terjadi fluktuasi inflasi pusat-pusat kota yang paling merasakan dampak dari hal ini. Jika pemerintah tidak awas dalam melakukan pencegahan-pencegahan seperti penyediaan dan pengadaan bahan konsumsi maka tidak dapat dipungkiri perekonomian dapat colaps ketingkat paling buruk.

Tingginya tingkat inflasi di Kota Padang pada umumnya disebabkan :<sup>24</sup>

1. Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok (sembako) yang biasa disebut dengan IHK, yang mencakup 150 macam kebutuhan pokok. Faktor utama pendorongnya adalah 9 kebutuhan pokok masyarakat.
2. Kenaikan Harga Kebutuhan Hidup yang biasa disebut Indeks Biaya Hidup (IBH) ditentukan oleh harga kebutuhan dasar masyarakat.
3. Belum bersinerginya koordinasi birokrasi antar instansi terkait, baik secara vertikal maupun horizontal serta koordinasi antar Kabupaten/ Kota dengan Propinsi, ataupun sebaliknya.
4. Belum adanya kesatuan gerak/langkah dalam mengatasi permasalahan yang berdampak pada beberapa kab/kota.

Tekanan inflasi yang cukup berat termasuk di Kota Padang disebabkan meningkatnya biaya produksi (*cost of production*) yang menyebabkan rendahnya

---

<sup>24</sup> [www.bappeda.padang.go.id](http://www.bappeda.padang.go.id) diakses pada 14 november 2016

kemampuan dan kapasitas distribusi yang pada gilirannya persediaan barang-barang di pasar tidak mampu mengimbangi kenaikan permintaan masyarakat (*excess demand*). Kelebihan permintaan pasar yang tidak mampu diimbangi dengan persediaan mendorong kenaikan harga-harga pasar. Gerakan kenaikan harga-harga pasar secara berkepanjangan itulah yang disebut inflasi.

Pengendalian inflasi daerah sudah seharusnya diagendakan dalam rencana strategis daerah. Namun hal ini belum bisa menjadi jaminan bahwa hal tersebut akan terlaksana mengingat otonomi daerah membebaskan pemerintah daerah untuk menentukan agenda prioritasnya sendiri. Selain itu, kebijakan-kebijakan pengendalian inflasi seperti kebijakan fiskal dan moneter merupakan kewenangan yang menjadi otoritas pemerintah pusat.<sup>25</sup> Dalam hal ini agenda pusat dapat menjadi tidak sejalan bahkan berseberangan dengan pemerintah daerah. Untuk itu, dibutuhkan upaya pendekatan kelembagaan agar agenda-agenda negara dapat bersinergi dengan agenda daerah.

Melalui TPID agenda pengendalian inflasi terbukti sukses untuk melakukan stabilitas harga di kota Padang. Pada tahun 2015 pemerintah kota padang gencar melakukan upaya-upaya pengendalian baik secara preventif maupun kuratif. Beberapa program TPID dalam mengendalikan inflasi antara lain:

1. Program gerakan penanaman sejuta cabai.

---

<sup>25</sup> Miriam Budiarjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 138

Gerakan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk menanam cabai di pekarangan sehingga ketergantungan dari pasar bisa di kurangi.<sup>26</sup> Gerakan menanam ini juga melibatkan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang berada ditingkat pemerintah kota Padang. Menurut asisten II Setdako Padang, Evyet Naszmar salah satu faktor keberhasilan menekan inflasi adalah mengajak TNI gencar menanam cabai.<sup>27</sup> Menurut Dwi Andreas Santoso, gerakan menanam masal ini tidak menguntungkan petani dan hanya akan membuat petani semakin tertekan.

## 2. Koordinasi setiap lembaga dalam memprioritaskan inflasi

Pemerintah kota Padang mengkoordinasikan pengendalian inflasi secara internal dan eksternal. Secara internal pemerintah memaksimalkan kerjasama antar SKPD dan juga komunikasi kepada seluruh *stakeholder* yang ada di kota Padang. Secara eksternal pemerintah melakukan komunikasi pemerintah daerah yang lainnya terkait pengadaan komoditas pangan. Menurut Walikota Padang, Mahyeldi Ansyarullah Kunci pengendalian inflasi kota Padang yaitu koordinasi setiap lembaga dan memastikan ketersediaan pasokan, sehingga meminimalisir gejolak harga.<sup>28</sup>

Dari pernyataan diatas dapat menjelaskan bahwa koordinasi atau pengkoordinasian mempunyai andil besar dalam menekan angka inflasi di kota Padang. Pemerintah kota padang dapat dikatakan berhasil dalam melakukan fungsi

---

<sup>26</sup> Heri Faisal, "Dinas Pertanian Padang Dorong Gerakan Tanam Sejuta Cabai", (Harian Sumatera, edisi 27 Januari 2015), <http://sumatra.bisnis.com/m/read/20150107/54043/dinas-pertanian-padang-dorong-gerakan-tanam-sejuta-cabai> diakses 2 Juni 2017

<sup>27</sup> Charlie, "Mampu Kendalikan Inflasi, Musi Rawas Cigap TPID Kota Padang", (Harian Andalas Pos, edisi 11 Oktober 2016), <http://andalas-time.com/2016/10/11/mampu-kendalikan-inflasi-musi-rawas-cigap-tpid-kota-padang/> diakses 2 Juni 2017

<sup>28</sup> Heri Faisal, "Strategi Pemkot Padang Kendalikan Inflasi", (Harian Sumatera, edisi 8 Agustus 2016), <http://sumatra.bisnis.com/m/read/20160808/4/64461/strategi-pemkot-padang-kendalikan-inflasi> diakses tanggal 9 Mei 2017.

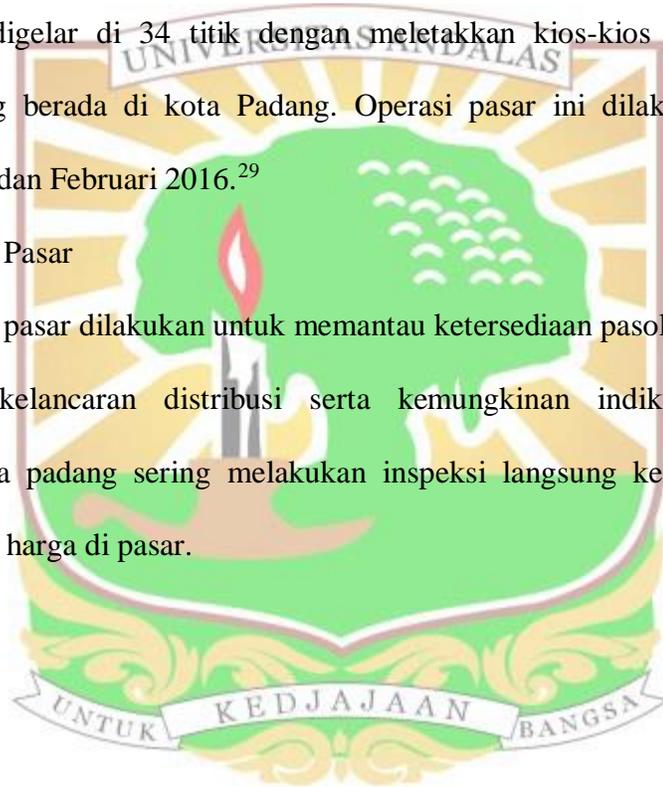
koordinasi dengan baik. Keberhasilan koordinasi berarti bahwa pemerintah berhasil melakukan integrasi dan sinkronisasi dari semua elemen unit organisasi dalam pelaksanaan tugas tertentu.

### 3. Intervensi pemerintah daerah lewat operasi pasar

Ketika terjadi gejolak harga pemerintah akan menggelar operasi pasar dengan memaksimalkan fungsi Bulog untuk mendistribusikan pangan. Di kota padang operasi pasar digelar di 34 titik dengan meletakkan kios-kios di seluruh pasar tradisional yang berada di kota Padang. Operasi pasar ini dilakukan pada bulan desember 2015 dan Februari 2016.<sup>29</sup>

### 4. Inspeksi Pasar

Inspeksi pasar dilakukan untuk memantau ketersediaan pasokan terkait jumlah pasokan dan kelancaran distribusi serta kemungkinan indikasi penimbunan. Pemerintah kota padang sering melakukan inspeksi langsung ke lapangan terkait dengan realisasi harga di pasar.



### 5. Hibauan atau *Moral Suasion*.

Himbau ini dimaksudkan untuk menjelaskan kepada masyarakat kondisi yang ada sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan barang. Hibauan bisa berupa pemantauan harga di pasar-pasar oleh Pemerintah Daerah.

---

<sup>29</sup> Melda, "Pemko Padang Gelar Operasi Pasar", (Harian Padang Media, edisi 17 Februari 2016), <http://padangmedia.com/pemko-padang-gelar-operasi-pasar/> diakses 16 Mei 2017

## 6. Pembentukan Ekspektasi Masyarakat.

Pembentukan ekspektasi masyarakat dilakukan dengan cara memberitahu dan mengkomunikasikan target inflasi tahun ini kepada masyarakat. Pemberitahuan ini bisa melalui media massa maupun elektronik.

## 7. Pembangunan infrastruktur

Dibidang infrastruktur, selain pembangunan jalan dan irigasi pemerintah juga melakukan penambahan kapasitas bongkar muat di pelabuhan Teluk Bayur.

## 8. Kebijakan penurunan tarif angkutan kota.

Pada tahun 2015 pemerintah kota Padang memberlakukan kebijakan penurunan tarif angkot. Menurut wakil walikota Padang TPID dapat memberikan rekomendasi kebijakan terhadap pemerintah kota dari hasil diskusi evaluasi terhadap sumber dan potensi tekanan inflasi daerah. Hal ini berarti bahwa TPID dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan di tempuh oleh pemerintah.

Pada tahun 2015 sampai Juni 2016 pemerintah Kota Padang berhasil melakukan perubahan yang signifikan dalam menekan angka inflasi. Dari angka inflasi tahun 2014 yang mencapai 11,90 persen pada tahun 2014 turun menjadi 0,22 persen sampai hitungan juni tahun 2016 secara *year to date (ytd)*. Fenomena ini akhirnya membawa pemerintahan Kota Padang untuk menerima penghargaan yang diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diberikan dalam rangka keberhasilan Pemko Padang sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah terbaik se-Sumatera tahun 2015.

Keberhasilan pengendalian inflasi daerah di era desentralisasi ini sangat dipengaruhi oleh dua hal yaitu bagaimana desentralisasi itu sendiri diarahkan dan

bagaimana koordinasi antara otoritas moneter (BI) dan otoritas fiskal (pusat dan daerah). Semangat otonomi daerah yaitu bahwa daerah lebih mengetahui dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat didaerahnya akan efektif jika disertai dengan desentralisasi fiskal. Kepercayaan pengelolaan fiskal yang diberikan kepada daerah tentunya sebagai bentuk konkrit dari kesungguhan negara dalam menjalankan desentralisasi.

Melihat keberhasilan Kota Padang dalam menekan tingkat inflasi bahwa koordinasi kebijakan fiskal-moneter dalam desentralisasi fiskal memberikan dampak positif terhadap stabilisasi perekonomian daerah. Sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang memiliki komitmen politik yang tinggi terhadap pengendalian inflasi daerah.

Keberadaan TPID di kota Padang juga merupakan langkah yang mempermudah negara dalam mengintegrasikan agenda pusat terhadap agenda-agenda daerah. Undang-undang pemerintahan daerah tahun 2014 berimplikasi pada kekuasaan pusat untuk mengarahkan program Pemda agar sejalan dengan *Political platform*. Pada dasarnya pengendalian inflasi merupakan tugas pemerintah pusat selaku pemegang otoritas fiskal dan moneter. Melalui politik anggaran, daerah yang dianggap berprestasi akan mendapatkan insentif lebih dari pusat.

Menarik bagi peneliti untuk melihat fenomena bahwa selama lima tahun sebelumnya inflasi Kota Padang merupakan inflasi dengan predikat tertinggi di Indonesia. Namun pada tahun 2015 pemerintah Kota Padang melalui TPID berhasil melakukan perbaikan sehingga inflasi kota menjadi terendah dan memperoleh predikat terbaik se-Sumatera. Untuk itu, maka rumusan penelitian pada penelitian ini

adalah : **Bagaimana Pola Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam Menekan Inflasi Kota Padang Pada Tahun 2015?**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk : Mendeskripsikan dan menganalisis tentang Pola Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menekan inflasi di Kota Padang Pada Tahun 2015.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek akademis dan aspek sosial yaitu:

- a) Secara akademis, Penelitian mengenai Peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Dalam Pengendalian Inflasi Kota Padang Pada Tahun 2015 diharapkan mengembangkan kajian ekonomi politik dan kajian literatur bagi peneliti ekonomi politik berikutnya.
- b) Secara praktis, penelitian ini juga dapat memberikan sebuah masukan baru terhadap kepentingan masyarakat secara umum, dan juga TPID kota lain di Indonesia pada khususnya.

